

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti efek, pengaruh, dapat membawa hasil manjur atau mujarab. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang dapat memberikan hasil yang baik untuk mencapai suatu tujuan.

Mardiasmo (2017 : 134) mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi sudah berhasil mencapai tujuannya berarti organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Menurut Sejathi (2011) efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Menurut Beni (2016 : 69) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur pada organisasi. Menurut Steer (2015 : 203) efektivitas artinya mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Efektivitas menurut Siagian (2016 : 24) adalah pemanfaatan sumber daya, saran, dan pasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar sudah ditetapkan sebelumnya untuk memberikan sebuah hasil dari kegiatan yang dijalankan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur suatu efektivitas dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang mudah. Karena efektivitas dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang dan *output* yang dihasilkan bersifat tidak berwujud, sehingga sulit untuk dihitung karena pencapaian hasil sering tidak terlihat dalam jangka pendek, namun bisa diketahui dalam jangka panjang setelah program berhasil dan biasanya pengukuran dinyatakan secara kualitatif berdasarkan mutu. Jadi jika mutunya baik, maka efektivitasnya juga baik.

Efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil dari kegiatan yang telah dilakukan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan penilaian dari pihak luar.

Efektivitas sebuah transaksi dapat dinilai dari kemudahan saat melakukan transaksi tersebut, efisiensi, tidak memakan waktu yang lama, keamanan yang terjamin, dan prosesnya bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

2.1.3 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Rerangka Kerja Terpadu Pengendalian Internal COSO dalam buku Meissier F. William (2014:192) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hery (2013:159) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut COSO merupakan konsep yang paling banyak diadopsi saat ini. Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO, tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berupa efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan kepada peraturan dan hukum yang berlaku, dapat tercapai oleh perusahaan.

Berikut tujuan pengendalian internal menurut Gelinas (2014:241) [14], yaitu:

- a. Tujuan internal untuk sistem operasi
 - 1) Untuk memberikan keyakinan atas efektivitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai
 - 2) Untuk memberikan keyakinan atas efisiensi penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan
 - 3) Untuk memberikan keamanan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan.
- b. Tujuan pengendalian internal untuk sistem informasi
 - 1) Menjamin penggunaan input transaksi yang valid, lengkap, dan akurat
 - 2) Menjamin master file selalu diperbaharui secara lengkap dan akurat.

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129)[1], yaitu :

- a. Menjaga asset organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi
- d. Mendorong dipatuhi kebijakan manajemen

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, meningkatkan akurasi informasi dan keandalan data akuntansi perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum serta untuk melindungi aset perusahaan.

2.1.5 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:4) unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari unsur pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian menentukan arah perusahaan memengaruhi kesadaran pengendalian pihak manajemen dan karyawan.

b. Penilaian Resiko

Perusahaan harus melakukan penilaian risiko untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi terkait dengan laporan keuangan.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, pengendalian komputer dan pengendalian fisik. Pengendalian komputer adalah pengendalian yang berhubungan dengan lingkungan teknologi informasi dan audit teknologi informasi. Sedangkan pengendalian fisik berhubungan dengan aktivitas manusia yang digunakan dalam sistem akuntansi.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas berbagai pencatatan dan metode yang digunakan untuk melakukan, mengidentifikasi, menganalisis, mengklarifikasi, dan mencatat berbagai transaksi perusahaan serta menghitung berbagai aktiva dan kewajiban yang terkait didalamnya. Kualitas informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akuntansi akan berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan, serta membuat laporan keuangan yang andal.

e. Monitoring

Monitoring adalah proses pengawasan yang memungkinkan kualitas pengendalian internal serta operasinya berjalan. Hal ini dapat dilakukan dengan

beberapa prosedur terpisah atau dengan melalui aktivitas yang berjalan. Dengan prosedur terpisah, para auditor internal mengumpulkan bukti kecukupan pengendalian melalui pengujian pengendalian, kemudian menginformasikan kekuatan dan kelemahan pengendalian kepada pihak manajemen. Sedangkan pengawasan melalui aktivitas yang berjalan dapat dilakukan melalui integrasi berbagai modul komputer yang terpisah ke dalam sistem informasi yang merekam berbagai data penting dan memungkinkan pengujian pengendalian dilakukan sebagai bagian dari operasional rutin.

2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada umumnya dibuat untuk memberikan jaminan bahwa aset perusahaan sudah diamankan secara tepat dan memberikan keakuratan informasi data perusahaan. Namun setiap entitas memiliki keterbatasan, sehingga memungkinkan pengendalian yang telah dirancang dan dijalankan tidak dapat memberikan keyakinan yang mutlak melainkan memberikan keyakinan memadai kepada manajemen dan dewan direksi.

Kelalaian karyawan dapat menjadikan pengendalian internal berjalan tidak efektif. Demikian juga dengan adanya kolusi di perusahaan dapat mengurangi efektivitas sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang merupakan tujuan dari pemisahan tugas. Oleh sebab itu adanya SOP sangat diperlukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik dan sesuai sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Sumber pemasukan kas terbesar bagi perusahaan dagang adalah dari transaksi penjualan, baik dari penjualan secara *offline* maupun *online*. Sistem pengendalian internal yang baik menjamin diterimanya penerimaan kas dari pembeli ke perusahaan dengan pencatatan dan nominal yang sesuai.

Pengendalian internal penerimaan kas dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Memberi batasan akses atau informasi kepada siapa saja data penerimaan kas boleh diketahui
- 2) Adanya pemisahan tugas dan fungsi antara individu yang menerima kas masuk, mencatat atau membukukan pemasukan, dan yang menyimpan kas
- 3) Setiap transaksi penjualan dan penerimaan kas harus disertai dengan dokumen sebagai bukti transaksi. Uang hasil penjualan harus disetor ke bank setiap hari oleh bagian kasir
- 4) Dilakukan pengecekan secara berkala atau verifikasi internal
- 5) Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan surat perjanjian atau uang pertanggungjawaban.

2.1.8 Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*
- 3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan

2.1.9 Manfaat Uang Elektronik

Dalam perekonomian modern saat ini, lalu lintas transaksi pertukaran barang dan jasa sudah sangat cepat, sehingga memerlukan sistem pembayaran yang andal dan memungkinkan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat, mudah, efisien dan aman.

Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, efisien, dan aman, sistem pembayaran mikro mulai mengalami perkembangan pesat di berbagai negara. Pembayaran mikro merupakan instrumen pembayaran untuk transaksi yang kecil namun memiliki volume yang tinggi serta membutuhkan waktu proses transaksi yang cepat.

Uang elektronik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pembayaran mikro yang diharapkan mampu memproses pembayaran dengan cepat dan dengan biaya yang relatif lebih murah.

2.1.10 Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *E-Money*

Walaupun banyak manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan uang elektronik, namun ternyata masih banyak kekurangan atau tantangan yang dihadapi dari penggunaan uang elektronik seperti :

- Data diri pribadi terbuka yang memungkinkan penyalahgunaan data.
- Munculnya *cyber crime*. Ketika peretas berhasil masuk ke akun nasabah, mereka bisa menguras habis uang yang terdapat pada uang elektronik tersebut.
- Munculnya berbagai masalah teknis. Metode pembayaran dengan uang elektronik sangat bergantung pada sistem jaringan komunikasi yang andal. Apabila terjadi masalah teknis pada sistem, maka transaksi bisa terhambat dan berujung gagal. Hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keandalan sistem pembayaran tersebut.
- Bagi mereka yang kurang pengetahuan terkait penggunaan bank atau telepon genggam akan mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi tanpa uang tunai (*cashless*)
- Beberapa orang akan mengalami kesulitan untuk mengontrol pengeluaran karena mereka tidak melihat uang fisik. Sehingga menimbulkan perilaku konsumtif tanpa disadari.
- Adanya biaya transaksi atau biaya admin yang sering dibebankan ke konsumen saat melakukan transaksi. Sedangkan jika menggunakan uang tunai, konsumen dapat melakukan transaksi tanpa biaya tambahan.
- Masalah infrastruktur. Saat ini untuk infrastruktur uang elektronik belum seluruhnya memadai, karena akses digital saat ini masih didominasi kalangan kelas menengah ke atas.

2.1.11 Jenis-Jenis Uang Elektronik

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang uang

elektronik menjelaskan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas uang elektronik dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Sedangkan berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana, uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Uang elektronik berbasis kartu (*chip based*)
- b. Uang elektronik berbasis *server*

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Single-Purpose*

Uang elektronik yang digunakan untuk melakukan kewajiban pembayaran yang timbul atas satu transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang dikhususkan untuk pembayaran tol atau transportasi umum

b. *Multi-Purpose*

Uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran atas berbagai jenis transaksi. Contohnya, uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, pembayaran listrik, telepon, dan berbelanja.

2.1.12 Jenis-Jenis Transaksi Pada Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum menurut Bank Indonesia adalah :

- a. Penerbitan (*issuance*) dan pengisian ulang (*top up*)
- b. Transaksi Pembayaran
- c. Transfer
- d. Tarik Tunai
- e. *Refund* atau *Redemption*

2.1.13 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik sebagai berikut :

- a. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan uang elektronik
- b. Pengguna adalah pihak yang menggunakan uang elektronik
- c. *Acquirer* adalah pihak yang melakukan kerjasama dengan penyedia barangatau jasa sehingga mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan. Selain itu, *acquirer* juga bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- d. Penyelenggara Kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing penerbit dan atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing- masing penerbit dan atau *acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- f. Agen Penerbit

Uang elektronik merupakan salah satu produk Layanan Keuangan Digital.LKD adalah kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasam dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun *web* dalam rangkakeuangan inklusif. Agen LKD merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dalam hal penerbitan maupun fasilitas yang melekat padauang elektronik, seperti *top up*, Tarik tunai dan transfer uang antar uang elektronik.

2.2 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Makarim (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerimaan kas PT Teduh Karya Utama Surabaya cukup besar dan PT Teduh Karya Utama Surabaya sudah menetapkan sistem pengendalian internal penerimaan kas yang cukup baik. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dalam komponen, unsur, dan prosedur pengendalian internal, seperti tidak adanya perputaran jabatan, dan perangkapan tugas oleh dalam melakukan penerimaan kas dan penyetoran kas ke

bank. Sama halnya dengan penelitian (Sitompul, 2019) yang menemukan bahwa penerapan pengendalian internal penerimaan kas di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KCP UNIT CIBITUNG belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang sudah dilakukan pemisahan secara fungsi, namun masih memiliki kelemahan, seperti ditemukannya perangkapan tugas yaitu fungsi penyimpanan kas yang menyatu dengan fungsi akuntansi dan fungsi operasional menyatu dengan fungsi penyimpanan kas. Begitupun dalam penelitian (Mukti, 2017) menunjukkan bahwa hasil penerimaan kas PT Arwinto Intan Wijaya cukup besar sekitar Rp 300 juta – Rp 800 juta per hari, sehingga PT Arwinto Intan Wijaya menerapkan sistem pengendalian internal penerimaan kas yang cukup baik. Namun terjadi beberapa ketidaksesuaian dalam komponen, unsur, dan prosedur sistem pengendalian internal yaitu sulitnya perputaran jabatan, tidak adanya pemisahan fungsi dalam melakukan penerimaan kas dan penyetoran dana ke bank.

Berbeda dengan penelitian (Tampubolon, 2018) yang menunjukkan bahwa struktur organisasi PT Rekadaya Elekrika Consult Medan sudah efektif. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sudah baik, karena hanya pihak yang berwenang di perusahaan yang memiliki otorisasi atas penerimaan kas. Setiap fungsi dalam perusahaan sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, artinya masing-masing fungsi sudah menjalankan tugas masing-masing dan tidak mencampuri tugas dari fungsi lain. Perusahaan memiliki banyak karyawan kompeten, keahlian yang dimiliki karyawan sudah sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Akomea-Frimpong et al. (2019) menyatakan bahwa kecurangan pada layanan uang elektronik terjadi pemberian gaji atau imbalan yang buruk kepada para karyawan dan manajer mereka. Para responden berpandangan bahwa beberapa karyawan bekerjasama dengan karyawan lain, pelanggan lain atau pihak operator uang elektronik untuk mencuri sejumlah uang. Para pelaku tersebut bekerjasama dengan cara memanipulasi sistem untuk mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut. Para pelaku dapat melakukan kecurangan seperti itu dikarenakan sistem pengendalian internal yang lemah dan dengan pengawasan yang buruk dari atas manajemen tingkat atas sampai karyawan tingkat bawah. Praktik penipuan dalam pelayanan dapat berkembang pesat karena pengelolaan

transaksi uang elektronik menggunakan sistem teknologi informasi yangburuk dan kuno. Dari hasil penelitian untuk memerangi kasus penipuan uangelektronik, Bank Ghana telah mengeluarkan pedoman EMI (*Electronic Money Issuers*) untuk pihak operator dan para agen uang elektronik. Bank Ghana terus memperbarui dokumen kebijakan tersebut berdasarkan apa yangterjadi di Ghana, pasar uang global dan pelajaran dari negara-negara lain yangsaat ini menjalankan operasi uang elektronik yang didukung oleh pemerintah untuk menekan kejahatan yang mungkin terjadi dalam operasi uang elektronik.

Kemudian dari penelitian (Laksmi & Permana, 2018) menyatakan bahwa kondisi saat ini menunjukkan transaksi e-commerce di Indonesia mencapai angka 42% dari tahun 2012-2015. Dari tingkat transaksi yang terus meningkat pada *e-commerce* maka pertumbuhan penggunaan *e-money* juga ikut meningkat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian (Sofyan Abidin, 2015) yang menemukan bahwa penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beralih dari uang tunai ke non tunai. Dengan meningkatnya penggunaan *e-money* dalam transaksi *e-commerce* maka dapat mendukung program pemerintah untuk menggunakan lebih sedikit uang tunai dalam transaksi pembayaran atau yang disebut *Less Cash Society* (LCS).

Dalam penelitian (Sugiharto et al., 2019) menjelaskan bahwa *e-commerce* merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Selain itu juga dapat memperluas akses pasar secara mudah dan efisien seiring era globalisasi yang harus dihadapi. Saat ini pembelian dan penjualan secara online melalui media sosial masih mendominasi di Indonesia. *E-commerce* harus dapat mengubah tren ini dengan memanfaatkan keunggulan fitur yang dimiliki, seperti apa yang dilakukan dengan perusahaan *payment gateway* DOKU yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha dalam melakukan penjualan *online* secara mudah. Pelaku UKM harus melakukan berbagai inovasi dalam menciptakan produk-produk yang berkualitas agar dapat dipasarkan di *e-commerce* dan dapat bersaing dengan produk UKM lain. Sehingga jika produk yang ditawarkan berkualitas, maka akan mendorong minat beli konsumen melalui *e-commerce* sehingga pembayaran secara elektronik menjadi

suatu kebiasaan dari waktu ke waktu. Kemudahan dalam sistem pembayaran dapat meningkatkan efisiensi, waktu dan biaya. Menerapkan gaya hidup *less cash society* di era globalisasi ini memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan transaksi tunai dari sisi biayapengadaan hingga resiko yang ditimbulkan.

Selanjutnya penelitian (Majhi et al., 2017) menyimpulkan bahwa meskipun dalam masa pertumbuhan, *e-commerce* dapat mengubah struktur dan proses perdagangan. Para manajer harus menciptakan model bisnis baru yang menekankan kembali skala, diferensiasi, dan merek untuk berkompetisi secara efektif pada infrastruktur dengan biaya transaksi yang rendah. Mereka juga harus membuang banyak waktu untuk mendesain ulang proses transaksi dan berpartisipasi dalam kelompok industri untuk mengembangkan *e-commerce*. Menerapkan strategi-strategi ini secara efektif dan sekaligus merekonsiliasi model bisnis baru maupun yang sudah ada akan menjadi kunci kesuksesan perusahaan. Pelanggan juga akan memiliki kepercayaan diri dan kenyamanan untuk mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga bersaing. *E-commerce* saat ini sedang berkembang dalam bidang penelitian dan pengembangan. Uang elektronik merupakan faktor penting di bidang perdagangan baru ini. Sistem pembayaran yang dapat diandalkan secara fungsi, harga dan kinerja akan ditentukan. Hal ini diperkirakan bahwa dalam masa mendatang sistem pembayaran berbasis internet yang optimal akan dijelajahi dan distabilisasikan.

Peningkatan sistem pembayaran elektronik dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena kemajuan perbankan dan aktivitas belanja online. Seiring dunia berkembang dengan perkembangan otomatisasi, kita dapat melihat munculnya sistem pembayaran elektronik dan gadget untuk memproses pembayaran. Hal ini akan mengurangi persentase transaksi cek dan tunai dengan menyediakan transaksi pembayaran online yang semakin meningkat, semakin baik dan semakin aman. Saat ini permasalahan yang terjadi dalam sistem pembayaran elektronik dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti resiko kredit, penipuan, kepatuhan, resiko likuiditas, resiko dari sistem tersebut, resiko dari kegiatan operasi dan transaksi, resiko strategi, dan reputasi. Kegiatan *e-commerce* berkembang setiap hari, dengan perkembangan tersebut maka perlu dipersiapkan keamanan yang terbaik untuk membantu bisnis berkembang. Biaya mengamankan

server e-commerce akan lebih murah daripada biaya pemulihan data setelah diserang atau diretas. Pengendalian, pengawasan, audit dan mengambil tindakan untuk mencapai tingkat keselamatan tertinggi sangat perlu dilakukan. Agar bisnis dapat terus berjalan dan berkembang. (Kumar, 2019)